

**PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SDA DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN JEMBER**

***THE ROLE OF THE PUBLIC WORKS, DEVELOPMENT AND SDA DEPARTMENT IN
THE DEVELOPMENT OF ROAD INFRASTRUCTURE TO IMPROVE COMMUNITY
WELFARE IN JEMBER DISTRICT***

Yeni Kusmita^{1*}, Sumarti², Moh.Fadil Gezali³, Moh.Haris Balady⁴

^{1*234} Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia
yenikusmita035@gmail.com

Abstrak: Dalam pembangunan infrastruktur jalan, peran Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sangat penting. DPU bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan untuk memastikan konektivitas yang lancar dan aman bagi masyarakat. Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya, DPU memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur jalan dilaksanakan dengan efisien dan memenuhi standar keamanan serta kelayakan teknis. Dengan demikian, DPU menjadi pilar utama dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui pengembangan infrastruktur jalan yang berkualitas. Melalui kegiatan pengabdian ini dimaksudkan untuk membantu masalah yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dalam pembangunan infrastruktur jalan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Solusi yang ditawarkan oleh tim pengabdian adalah Lebih memprioritaskan Jalan yang lebih dilewati oleh Masyarakat, dan membatasi kendaraan yang membawa muatan yang berlebih yang akan menimbulkan kerusakan pada jalan, dan dengan saling bekerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan Polisi.

Kata Kunci: *DPU, Infrastruktur Jalan, Pembangunan*

Abstract: In developing road infrastructure, the role of the Public Works Department (DPU) is very important. DPU is responsible for planning, developing and maintaining roads to ensure smooth and safe connectivity for the community. Through collaboration with local governments and other related institutions, DPU ensures that road infrastructure projects are implemented efficiently and meet safety standards and technical feasibility. Thus, DPU becomes the main pillar in facilitating economic and social growth through the development of quality road infrastructure. Through this service activity, it is intended to help with the problems faced by the Public Works Department in building road infrastructure to improve community welfare. The solution offered by the service team is to prioritize roads that are more used by the public, and limit vehicles carrying excessive loads which will cause damage to the road, and by mutual cooperation between the Public Works Department, Transportation Department and the Police.

Keywords: *DPU, Road Infrastructure, Development*

Received	Revised	Published
15 Januari 2024	10 Maret 2024	15 Maret 2024

Pendahuluan

Pembangunan Infrastruktur jalan yang memadai merupakan salah satu elemen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki beberapa peran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan salah satu upaya pemerintah adalah dengan menyediakan Sarana dan Prasarana infrastruktur di Indonesia. Infrastruktur yang

memadai sangat diperlukan, seperti infrastruktur jalan raya yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, karena juga memegang peranan yang sangat penting dalam aktivitas sehari-hari, karena memberikan kemudahan akses terhadap pelayanan Kesehatan, Pendidikan, pasar dan lapangan kerja. Oleh karena itu, sangat penting agar kondisi jalan memenuhi harapan Masyarakat. Sebagai bagian dari infrastruktur transportasi, jalan mempunyai peranan penting dalam perekonomian, kemasyarakatan, kebudayaan, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan serta digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. (Arfindy et al, 2019)

Melihat Pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Jember masih belum begitu maksimal, Hal ini dikarenakan adanya beberapa kerusakan disepanjang badan jalan, artinya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jember belum maksimal karena kondisi jalan yang masih rusak. Perlu kita ketahui bersama bahwa infrastruktur jalan yang baik memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan perekonomian Masyarakat di Kabupaten Jember.

Level kerusakan jalan mengacu pada sejauh mana suatu jalan telah rusak atau terdistorsi akibat penggunaan jangka panjang, kemacetan, pengumpulan data lapangan yang tidak tepat, kondisi cuaca ekstrem, lalu lintas padat, atau faktor lainnya. Kerusakan pada jalan dapat bervariasi mulai dari kerusakan permukaan yang cukup ringan seperti retakan kecil, lubang, atau keausan aspal hingga masalah struktural yang lebih serius seperti perubahan bentuk perkerasan, penurunan tanah, atau bahkan runtuhnya sebagian atau seluruh bagian jalan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan sistem atau skala penilaian khusus yang mungkin bervariasi tergantung pada lokasi geografis atau standar yang diterapkan. (Fajar et al, 2021)

Alasan memilih subyek pengabdian ini nadalah karena, Pembangunan infrastruktur adalah factor krusial dalam mempercepat kemajuan Pembangunan baik tingkat nasional maupun regional. Infrastruktur juga memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat investasi suatu negara atau wilayah sangat terkait dengan ketersediaan infrastruktur yang mencakup transportasi, telekomunikasi, pengelolaan limbah, dan pasokan energi. Dengan demikian, perluasan infrastruktur menjadi pondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. (Suratno,2010)

Dalam hal ini, pengabdian diarahkan untuk memberikan solusi konkret bagi masalah yang ada, dengan melibatkan semua stakeholder terkait, seperti, pemerintah daerah, akademisi, dan institusi terkait lainnya. Dengan melakukan pengabdian yang berkelanjutan dan holistik, diharapkan dapat mencapai Kesejahteraan masyarakat dengan Peran Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga & SDA di Kabupaten Jember.

Metode

Peran Dinas Pekerjaan Umum dalam Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jember, melibatkan beberapa tahapan penting yaitu, proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini dilakukan melalui survei lapangan, wawancara, dan diskusi dengan karyawan Penata Tk 1, Jabatan Penalaah Pengelolah Leger Jalan, pada Bidang Data dan Aset Infrastruktur yang menangani dalam pelaksanaan Pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur yang menjadi kewenangan Dinas.

Dalam proses ini, kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua karyawan Dinas Pekerjaan Umum dan Masyarakat sangat penting. Dinas Pekerjaan Umum perlu memiliki kesadaran dan komitmen untuk bekerja sama secara efektif dalam mengatasi masalah dan mencapai tujuan bersama. Dengan pengorganisasian Dinas yang baik, diharapkan Dinas Pekerjaan

Umum di Kabupaten Jember dapat meningkatkan Pembangunan infrastruktur jalan dengan baik secara signifikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Subyek pengabdian dalam hal ini adalah Penata Tk 1 pada Bidang Data dan Aset Infrastruktur yang menangani dalam pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum.

Tempat dan lokasi pengabdian di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga SDA, Jubung-Kabupaten Jember, Keterlibatan subyek dampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan Dinas Pekerjaan Umum sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Subyek dampingan adalah individu atau kelompok yang akan mendapatkan manfaat langsung dari proyek atau program yang dilakukan dalam Dinas Pekerjaan Umum, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan akan merasa memiliki proyek pembangunan infrastruktur atau program yang dilakukan dan lebih mungkin untuk berpartisipasi secara aktif. Hal ini juga dapat meningkatkan keberlanjutan proyek Pembangunan infrastruktur dalam jangka panjang, karena subyek dampingan dapat merasakan manfaat langsung dan memiliki kepentingan dalam kelangsungan program pembangunan infrastruktur tersebut

Hasil dan Pembahasan

Salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah menerapkan konsep inovatif dalam administrasi pemerintahan daerah. Di beberapa negara, kemajuan teknologi informasi dimanfaatkan untuk menciptakan pendekatan baru dalam pembangunan. Penerapan prinsip ini dapat diadopsi di berbagai kota di Indonesia guna memenuhi kebutuhan masyarakat, serta diharapkan dapat mengatasi sejumlah tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, seperti dalam hal transportasi, pendidikan, layanan kesehatan, manajemen kependudukan, dan pelayanan publik lainnya. (Setiawan, 2019)

Sama halnya dengan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dalam pengembangan infrastruktur jalan di Kabupaten Jember. Peran mereka dalam penelitian ini dianalisis melalui upaya meningkatkan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sumber daya air yang tersedia, didukung dengan adanya data yang terkini dan sistem informasi yang mutakhir. (Kasmira, 2020)

1. Perencanaan.

Perencanaan adalah konsep yang disusun dan dipersiapkan secara sistematis oleh sebuah organisasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan pemilihan dan definisi kegiatan, termasuk apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan merupakan proses yang berkelanjutan yang tidak berakhir ketika rencana telah dikembangkan, namun tetap diperlukan saat rencana itu diimplementasikan. Ini adalah tahap awal di mana pemerintah merencanakan pembangunan yang diinginkan di daerah Jember.

2. Pelaksanaan

Implementasi pembangunan memiliki dampak yang signifikan karena kesuksesan pemerintah dalam perencanaan tercermin pada hasil yang sangat baik dan penyelesaian proyek, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Jember.

3. Pengawasan

Pengawasan terutama ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran untuk kegiatan yang direncanakan dan dicatat dalam anggaran negara. Pengawasan adalah kegiatan yang menentukan dan mengevaluasi ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan. Pengawasan mengacu pada evaluasi hasil akhir. Untuk mencapai hasil yang baik, hasil seluruh pekerjaan jalan yang dilakukan di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember sangatlah penting. (Karmila, 2017)



Gambar 1. Wawancara dengan Gapurnomo, Penata Tk 1 Bidang Aset & Infrastruktur

Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang memengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Jember, antara lain: Pertama, Pemenuhan Data, Data yang begitu banyak dan kurang meneliti lagi data-data yang lebih di prioritaskan. Kedua, Tidak tersedianya Leger Jalan, yang merupakan dokumen yang mencakup peta lokasi jalan, informasi mengenai jalan dan jembatan, data mengenai utilitas dan reklame, serta informasi tentang kepemilikan lahan jalan. Dengan adanya leger tersebut akan memudahkan untuk Pembangunan jalan yang lebih di prioritaskan. Ketiga, Kurangnya kesadaran Sumber Daya Manusia dalam tugas tanggung jawabnya dan Pemangku Kebijakan. Oleh karena itu untuk mengatasi beberapa masalah diatas pastinya harus ada pengikat yang saling berjalan satu sama lain, seperti yang Pertama, Dinas Pekerjaan Umum, Mempunyai tugas dalam bertanggung jawab mengatasi Pembangunan Infrastruktur Jalan. Kedua, Menurut UU Nomor 22 tahun 2009, Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran terkait perizinan angkutan umum, persyaratan teknis, serta keselamatan jalan bagi kendaraan bermotor yang memerlukan keterampilan atau peralatan khusus, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang tersebut. Ketiga, Polisi, dimana tugas polisi disini yaitu melanggar Masyarakat yang telah melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Dengan hal tersebut maka Pembangunan infrastruktur akan berjalan dengan baik dan lancar yang akan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember dalam pembangunan infrastruktur jalan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember dengan memperbaiki proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi ketersediaan sumber daya air. Hal ini didukung oleh

ketersediaan data dan sistem informasi yang mutakhir. Baik dengan memprioritaskan jalan-jalan yang paling banyak dilalui Masyarakat, maupun dengan membatasi jumlah kendaraan dengan muatan berlebih yang dapat mengakibatkan kerusakan jalan, serta melalui gotong royong Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian.

Ucapan Terima Kasih

Ucapkan terima kasih kepada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan SDA Kabupaten Jember atas izin dan kesempatan yang telah diberikan untuk melaksanakan pengabdian di lembaga Dinas PU. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan LPPM Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua responden yang telah menyediakan data dan informasi yang sangat berharga untuk keberhasilan pengabdian ini dengan judul "Peran Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan SDA dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember". Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi para pembaca.

Referensi

- Arfindy, *et al.* (2019). Kinerja Pengelolaan Jalan dan Jembatan Dalam Perspektif Pelayanan Publik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tahun 2017. *JIPAGS*, 3 (1), 448-469.
- Alwi, *et al.* (2021). Analisis Tingkat Kerusakan pada Jalan Pagerbarang–Margasari Kabupaten Tegal. *Infratech Building Journal*, 2 (2), 49-57.
- Kamaruddin, *et al.* (2021). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Raya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 9 (3), 261.
- Setiawan, I. (2019). Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 di Kota Pontianak. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 1 (1), 1-14.
- Kasmira, Alyas, Sudarmi. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Gowa. *Journal Unismuh*, 1 (3).
- Karmila Akib, Olfi Alfionita. (2017). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 8 (1)